

EVALUASI IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DI DAERAH TERTENTU

Sasli Rais

Manajemen, STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen

E-mail : sasli2014@gmail.com

Abstraksi :

Evaluation is an assessment of the results of implementing government assistance activities. Evaluation is carried out based on the results of monitoring and supervision of the implementation of government assistance activities that have been carried out starting from the process of input, output, and results obtained in accordance with the objectives, objectives, principles and mechanism of activities and plans and schedules of activities that have been prepared.

Therefore, to make it easier to obtain information on the implementation of superior products in certain regions, it is necessary to evaluate the implementation of superior products in this particular area. The question that needs to be answered is whether the implementation of superior product programs in certain regions has been achieved, how they impact the community and local government

This study uses the SWOT analysis method because it is considered as the most basic method of analysis, useful for viewing problems from 4 (four) different sides. Analysis results can provide direction / recommendations to maintain strength and increase the benefits of opportunities, while reducing deficiencies and avoiding threats.

Based on the results of the evaluation of the implementation of superior products in this particular area, using the SWOT analysis method is obtained as follows: 1. No superior product implementation in a particular area has run optimally; 2. Achievement of the implementation of superior products in certain regions is only at the final stage of coordination with the regional government and private parties; 3. The superior product implementation in certain regions has not had any impact at all because the superior product program has not been implemented 100%; 4. Constraints and obstacles in the implementation of superior product programs in certain regions are more due to internal factors than external factors.

Kata Kunci: Evaluasi, Implementasi, Produk Unggulan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan arah kebijakan baru pada tahun 2017 ini dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prioritas Kegiatan Kementerian yang meliputi: 1) Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades); 2) Embung; 3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ; dan 4) Sarana Olahraga desa. Melalui kebijakan baru ini maka diharapkan terjadi

multiplier effect bagi percepatan pengembangan daerah tertentu.

Oleh karena itu, untuk menjamin pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan pelaksanaan bantuan pemerintah di daerah tertentu sesuai dengan tujuan dan sarannya, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang maka diperlukan pengendalian (monitoring dan evaluasi) terhadap pelaksanaan bantuan pemerintah tersebut.

Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi atas penyaluran bantuan pemerintah dalam ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat perkembangan capaian dari tujuan maupun sasaran penyaluran bantuan pemerintah. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan supervisi dari pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang telah dilakukan mulai proses masukan, keluaran, dan hasil yang diperoleh apakah sesuai dengan tujuan, sasaran, prinsip-prinsip dan mekanisme kegiatan serta rencana dan jadwal kegiatan yang telah disusun.

Oleh karena itu, untuk mempermudah mendapatkan informasi atas pelaksanaan produk unggulan di daerah tertentu maka diperlukan evaluasi atas pelaksanaan produk unggulan di daerah tertentu. Pertanyaan yang perlu mendapatkan jawabannya adalah apakah pelaksanaan program produk unggulan di daerah tertentu selama ini sudah tercapai, bagaimana dampaknya bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud dari kegiatan Evaluasi Implementasi Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu adalah agar tersedia dokumen hasil pelaksanaan program Evaluasi Implementasi Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu yang akan dijadikan dasar untuk tindak lanjut pelaksanaan produk unggulan selanjutnya.

2) Tujuan

Tujuan dari kegiatan Evaluasi Implementasi Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu yaitu:

- 1) Mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan Evaluasi Implementasi Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu,
- 2) Mendapatkan informasi dan data capaian pelaksanaan Program Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu,
- 3) Mendapatkan informasi dan data terkait dampak dari pelaksanaan Program Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu,
- 4) Mendapatkan informasi terkait kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu.

II. METODOLOGI

Dalam melaksanakan Evaluasi Implementasi Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu diperlukan penggunaan metodologi yang tepat. Ketepatan memilih metodologi ini merupakan hal yang sangat penting untuk kesempurnaan hasil pekerjaannya.

A. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, yang dilakukan proses Penyusunan Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Prukades

pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini secara detail, kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) *Metode pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan Desk study* melalui data sekunder dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan, data ataupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan catatan koordinasi internal Ditjen, koordinasi dengan internal Kementerian, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta maupun informasi informal melalui WAG daerah tertentu.
Desk study dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran dan alokasi waktu yang ada.
- 2) *Penyusunan Evaluasi*
Mengolah data dan informasi yang dihasilkan dari desk study.
- 3) *Waktu dan Lokasi*
Waktu yang dibutuhkan adalah 3 bulan (September - November) dan lokasi yang dianalisis sebanyak 29 daerah tertentu sebagai lokasi program produk unggulan di daerah tertentu.

B. Analisa SWOT

Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Satu hal yang harus diingat baik-baik oleh para pengguna analisa SWOT, bahwa analisa SWOT adalah semata-mata sebuah alat analisa yang ditujukan untuk

menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi seperti Ditjen PDTu, Kementerian Desa ini, dan bukan sebuah alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar yang “cespleng” bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi (<http://www.geocities.com>: hal 2).

Analisis SWOT singkatan dari *strengths, weaknesses, opportunities*, dan *threats* merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan strategis yang dimaksud adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Proses dalam hal ini lebih pada urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya.

Strategi dalam analisis SWOT pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Meskipun pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dll. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 (<http://id.wikipedia.org>).

Metoda analisa SWOT dianggap sebagai metoda analisa yang paling dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 (empat) sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan/rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisa SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yg terlupakan atau tidak terlihat selama ini (<http://meidii.multiPLY.com>).

Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu :

S = *Strength*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari

organisasi atau program pada saat ini.

W = *Weakness*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.

O = *Opportunity*, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.

T = *Threat*, adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

Selain empat komponen dasar ini, analisa SWOT dalam proses pengana-lisaannya akan berkembang menjadi beberapa Sub komponen yang jumlahnya tergantung pada kondisi organisasi. Sebenarnya masing-masing sub komponen adalah pengejawantahan dari masing-masing komponen, seperti komponen strength mungkin memiliki 12 sub komponen, komponen *weakness* mungkin memiliki 8 sub komponen dan seterusnya.

C. Jenis Analisa SWOT

Terdapat dua model analisa SWOT yang umum digunakan dalam melakukan analisa situasi yaitu (Hasanuddin, 2008):

1) *Model Kuantitatif*

Sebuah asumsi dasar dari model ini adalah kondisi yang berpasangan antara S dan W serta O dan T. Kondisi berpasangan ini terjadi karena diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan yang tersembunyi dan dari setiap kesempatan yang terbuka selalu ada ancaman yang harus diwaspadai. Ini berarti setiap satu rumusan *Strength* (S), harus selalu memiliki satu

pasangan *Weakness* (W) dan setiap satu rumusan *Opportunity* (O) harus

memiliki satu pasangan satu *Threat* (T).

Tabel 1. Contoh Pasangan Kekuatan dan Kelemahan

Komponen	Sub Komponen	Komponen	Sub Komponen
S	Organisasi saat ini memiliki jumlah anggota yang sangat besar	W	Jumlah anggota yang besar menurunkan tingkat efektifitas koordinasi dan komunikasi antar anggota

Tabel 2. Contoh Pasangan Kesempatan dan Ancaman

Komponen	Sub Komponen	Komponen	Sub Komponen
O	Perbaikan tingkat ekonomi membuat makin banyak anak-anak Hindu yang bersekolah hingga perguruan tinggi di Surabaya, sehingga calon anggota KMHDI PC Surabaya makin banyak	T	Calon anggota yang berasal dari keluarga yang mapan seringkali tidak militan dan bersifat agak borjuis

2) *Model Kualitatif*

Urut-urutan dalam membuat analisa SWOT kualitatif, tidak berbeda jauh dengan urutan-urutan model kuantitatif, perbedaan besar diantara keduanya adalah pada saat pembuatan sub komponen dari masing-masing komponen. Apabila pada model kuantitatif setiap sub komponen S memiliki pasangan sub komponen W, dan satu sub komponen O memiliki pasangan satu sub komponen T, maka dalam model

kualitatif hal ini tidak terjadi. Selain itu, Sub Komponen pada masing-masing komponen (S-W-O-T) adalah berdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Ini berarti model kualitatif tidak dapat dibuatkan Diagram Cartesian, karena mungkin saja misalnya, Sub Komponen S ada sebanyak 10 buah, sementara sub komponen W hanya 6 buah..

Tabel 3. Contoh Model Kualitatif

Komp	Sub.Komp	Komp	Sub.Komp
S	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi memiliki anggota yang banyak 2. Organisasi memiliki cadangan dana yang besar 3. Organisasi memiliki peraturan yang lengkap 4. Organisasi memiliki sekretariat yang representatif 	W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya organisasi adalah budaya tradisional yang menghambat tercapainya kondisi kerja yang efisien 2. Keinginan anggota untuk belajar dari kesalahan sangat rendah

Sebagai alat analisa, analisa SWOT berfungsi sebagai panduan pembuatan peta. Ketika telah berhasil membuat peta, langkah tidak boleh berhenti karena peta tidak menunjukkan kemana harus pergi, tetapi peta dapat menggambarkan banyak jalan yang dapat ditempuh jika ingin mencapai tujuan tertentu. Peta baru akan berguna jika tujuan telah ditetapkan. Bagaimana menetapkan tujuan adalah bahasan selanjutnya yaitu membangun visi-misi organisasi atau program. Dalam tulisan ini, metode analisis yang tepat digunakan adalah dengan metode kualitatif.

III. KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kawasan Perdesaan)

1) Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari “empowerment” pada intinya diartikan: “membentuk individu untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan dirinya, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.” Sementara Shardlow (1998: 32) mengatakan bahwa pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Sesuai dengan pernyataan di atas, bahwa pemberdayaan adalah dalam perspektif yang lebih luas yang sering diartikan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah

proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang disebut sebagai *The Politics of Alternative Development*, yang menghendaki adanya “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and sustainability or intergenerational equity*” (Friedmann, 1992). Selanjutnya, Kartasmita (1996) mengutip pendapat beberapa ahli dengan melukiskan konsep pemberdayaan itu sebagai suatu konsep yang tidak mempertentangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi memadukan antara keduanya, karena sebagaimana dikatakan oleh Brown (1995), kedua konsep tersebut tidak harus diasumsikan sebagai “tidak cocok atau berlawanan (*incompatible or antithetical*)”.

Konsep pemberdayaan berusaha melepaskan diri dari perangkap “*zero-sum game*” dan “*trade off*”, dan bertitik tolak dari pandangan bahwa melalui pemerataan akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan sekaligus akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dengan perbaikan. Oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), “*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*”. Hal yang dikehendaki sebenarnya adalah “*the right kind of growth*” (Ranis, 1995) yakni bukan yang vertikal dan menghasilkan “*trickle-down*”, karena sudah terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*) yakni “*broadly based, employment intensive, and not compartmentalized*”.

Sejalan dengan konsep para ahli di atas, Kartasmita (1996) menyatakan bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konteks pemikiran tersebut, upaya memberdayakan masyarakat haruslah diawali dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang atau dikembangkan. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena apabila demikian adanya maka masyarakat tersebut sudah punah.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya meliputi penguatan individu, tetapi juga berbagai pranatanya (*institutions*) berupa penguatan, misalnya dalam bentuk penanaman nilai-nilai budaya modern, seperti: kerja keras, hemat, keterbukaan, dan sikap bertanggungjawab yang menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat. Demikian pula, pemberdayaan masyarakat juga menyangkut pembaharuan lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya, khususnya yang menyangkut partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam proses pembangunan di lingkungannya. Atas dasar pandangan tersebut maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan nilai demokrasi di masyarakat. Dalam konteks ini, Friedmann (1992), menyatakan “*The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of*

territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning”.

Dengan demikian maka pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangun daya berupa kekuatan baru atau potensi yang dimiliki masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga orang atau masyarakat menjadi berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan dan keterbelakangan.

2) Pemberdayaan dan Strategi Pembangunan Kawasan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi atau merupakan paradigma pembangunan yang dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan masyarakat, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Pemberdayaan masyarakat muncul dikarenakan adanya berbagai kegagalan yang dialami dalam proses dan pelaksanaan pembangunan yang cenderung sentralistis seperti *community development* atau pengembangan komunitas. Pembangunan dengan model seperti ini tidak memberi kesempatan langsung kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan pejabat, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.

Dalam hal keterkaitan pemberdayaan dan pembangunan sebelumnya Schumacher (1973) lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan aspek politik dalam proses pemberdayaan masyarakat,

dengan menyatakan: *economic development can succeed only if it is carried forward as a board popular "movement reconstruction" with the primary emphasis on the full utilization of the drive, anthusias, intelligence an labour power of every one.* Sedangkan strategi yang paling tepat adalah dengan memberikan masyarakat berupa sarana agar mampu dan dapat mengembangkan diri. Lebih lanjut Schumacher mengemukakan bahwa, dalam proses pemberdayaan masyarakat NGO (*nongovermental organization*) memiliki tempat yang istimewa dalam kaitannya membentuk kelompok mandiri.

Perkembangan selanjutnya, Elliot (1987) menyatakan bahwa terdapat tiga strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu :

- 1) *The Welfare Approach.* Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memberdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan rakyat.
- 2) *The Development Approach.* Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- 3) *The Empowerment Approach.* Pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik ataupun kekuasaan dan berusaha untuk memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Friedmann (1992) menawarkan konsep atau strategi pembangunan yang populer disebut dengan *empowerment* atau pemberdayaan. Konsep pemberdayaan ini adalah sebagai suatu konsep alternatif pembangunan yang pada intinya memberikan tekanan pada otonomi dalam

mengambil keputusan di suatu kelompok masyarakat yang dilandaskan pada sumberdaya pribadi, bersifat langsung, demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Fokus utama pemberdayaan, menurut Friedmann adalah sumberdaya lokal, namun bukan berarti mengabaikan unsur-unsur lain yang berada di luar kelompok masyarakat, bukan hanya ekonomi akan tetapi juga pendidikan, politik dan yang lainnya agar masyarakat memiliki posisi tawar menawar yang seimbang, baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.

Strategi pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memandirikan, serta menswadayakan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimilikinya secara utuh dan konprehensif agar harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya tidak mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi pranata hidup yang ada dalam masyarakat itu sendiri, perlu dan harus diberdayakan. Melalui strategi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

3) Proses Pemberdayaan Masyarakat Kawasan

Implementasi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya tidak dapat berlangsung begitu saja, namun dilaksanakan dengan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara

bertahap melalui tiga fase (Pranaka dan Prijono, 1996) yaitu:

- a. **Fase Inisiasi.** Fase ini merupakan fase pemberdayaan yang menggambarkan bahwa semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, dan masyarakat hanya melaksanakan apa yang direncanakan dan diinginkan oleh pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah.
- b. **Fase Partisipatoris.** Fase ini merupakan fase pemberdayaan yang menggambarkan bahwa proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah dan masyarakat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada dasarnya masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian.
- c. **Fase Emansipatoris.** Fase ini merupakan fase pemberdayaan yang menggambarkan bahwa proses pemberdayaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat dengan didukung oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada dasarnya fase emansipatori ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat dilakukan dalam mengaktualisasikan dirinya. Puncak dari kegiatan proses pemberdayaan masyarakat ini adalah ketika pemberdayaan ini semuanya datang dari keinginan masyarakat sendiri.

4) Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kawasan

Pada dasarnya pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan menempatkan masyarakat tidak sebagai objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi

merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Berdasarkan konsep tersebut, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan (Sumodiningrat, Gunawan, 2002), sebagai berikut: pertama, upaya itu harus terarah. Secara populer hal ini disebut sebagai pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada masyarakat yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program tersebut harus langsung mengikutsertakan masyarakat atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni: agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok masyarakat, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Hal ini juga dalam lingkup bantuan menjadi terlalu luas apabila penanganannya dilakukan secara individu. Jadi, pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Selanjutnya ada pendekatan yang banyak digunakan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu advokasi. Pendekatan advokasi pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965), dengan model pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan

dalam sistem hukum, di mana penasehat hukum berhubungan langsung dengan kliennya sendiri. Dengan demikian, pendekatan advokasi menekankan pada proses pendampingan kepada kelompok masyarakat dan membantu mereka untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang dan memobilisasi sumberdaya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) dari kelompok masyarakat tersebut. Pendekatan advokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakekatnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan dan sistem nilai sendiri-sendiri. Masyarakat pada dasarnya bersifat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai sumberdaya tidak sama yang dapat diakibatkan letak geografis/wilayah, transportasi dan keterjangkauan lainnya.

Selanjutnya, dengan pendekatan advokasi masyarakat dalam jangka panjang diharapkan masyarakat mampu secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari proses pembangunan itu sendiri, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Dalam perkembangannya, pendekatan advokasi dapat pula diartikan sebagai salah satu bentuk "*penyadaran*" secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan yang dilaksanakan.

5) Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan

Pasca reformasi 1998, kondisi masyarakat dan kawasan perdesaan belum menunjukkan adanya perbaikan yang berarti. Malahan, sejak krisis ekonomi

melanda perekonomian nasional kondisi sosial dan ekonomi kawasan perdesaan cenderung semakin memburuk. Banyak faktor berperan dibalik keadaan. Konsep pembangunan nasional yang puluhan tahun cenderung merugikan kawasan dan masyarakat perdesaan. Sehingga untuk memperbaiki keadaannya perlu perubahan yang fundamental dalam konsep pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologinya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan *sustainable development* dapat digambarkan dalam kerangka pada gambar 3.3.

Selain itu, upaya pemberdayaan semestinya memfasilitasi dan mendorong masyarakat pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh dan petani untuk mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya sehingga mampu secara efisien dan menjamin pemenuhan pangan serta memperoleh surplus yang dapat dijadikan modal.

Pada beberapa masyarakat lokal, telah tumbuh beberapa institusi tradisional yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai kegiatan produksi yang lebih efisien disesuaikan dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh masyarakat setempat.

Dalam studi yang dilakukan Subejo dan Iwamoto, telah dapat diidentifikasi bahwa masyarakat lokal di daerah dataran tinggi dengan keterbatasan sumberdaya produksi telah mengorganisasikan diri ke dalam kelompok atau grup melalui institusi pertukaran kerja (*labor exchange institutions*) yang ternyata sangat efisien dan efektif.¹

Terkait dengan mekanisme ekonomi, sebenarnya telah banyak upaya untuk menciptakan institusi ekonomi dengan maksud meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar. Namun nampaknya kelembagaan ekonomi yang ada belum dapat sepenuhnya memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. Salah satu contoh adalah pembentukan koperasi pedesaan yang diarahkan pada

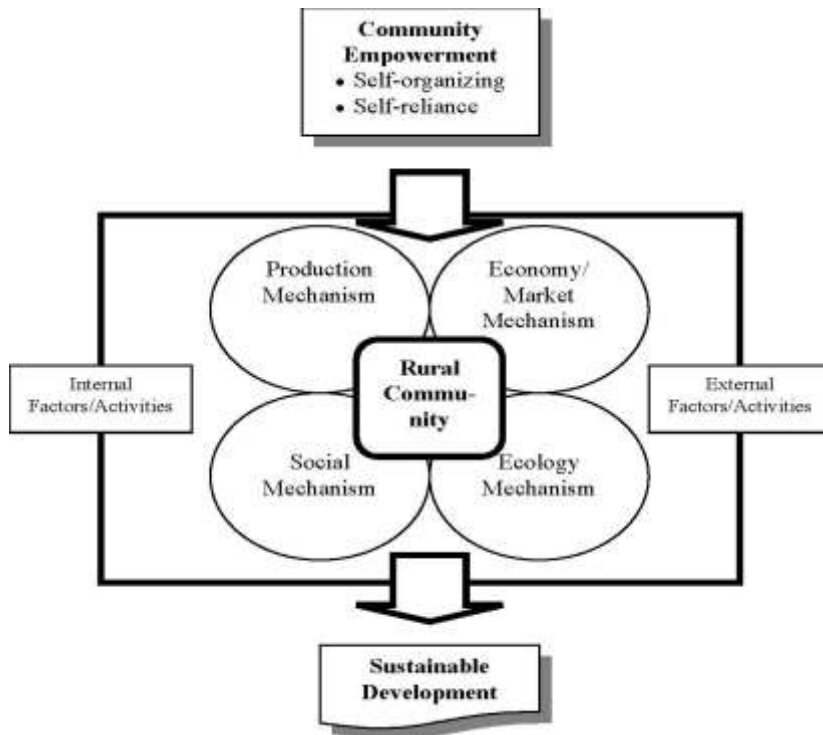
penyediaan sarana prasarana produksi atau usaha di beberapa tempat menunjukkan keberhasilan, namun pada banyak kasus justru mengalami kegagalan karena tidak melibatkan masyarakat secara penuh. Manfaat dan keuntungan baru dinikmati secara signifikan oleh pihak tertentu.

Subejo dan Supriyanto, mengidentifikasi bahwa beberapa institusi lokal-tradisional terkait dengan ekonomi/pasar yang sebenarnya sudah mulai dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya (*self-organizing*). Munculnya kelompok simpan pinjam tradisional (*arisan*) yang secara luas dikenal dengan *rotation saving and credit associations* (ROSCAs) merupakan sumber permodalan lokal antar petani merupakan salah satu wujud pemberdayaan petani secara internal. Di daerah pegunungan seperti di sekitar Gunung Slamet Banyumas dengan keterbatasan sumberdaya alam dan ekonomi, masyarakat lokal secara kreatif menciptakan lembaga institusi lokal yang disebut dengan "*prayaan*" yang menggabungkan prinsip ekonomi pasar dan keeratn hubungan sosial yang dikembangkan untuk berbagai kegiatan produktif.²

¹ Subejo dan Supriyanto, 2004, *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Short paper pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Study on Rural Empowerment (SOREM)*-Fak. Pertanian UGM tanggal 16 Mei 2004.

² *Ibid*

Gambar 3.1: Keterkaitan Pemberdayaan Masyarakat dengan Sustainable Development



Menurut pendapat Sadjad bahwa selama ini program pemberdayaan secara ekonomi masih *on farm centralism*. Mestinya pemberdayaan lebih diarahkan supaya tumbuh rekayasa agribisnis sehingga petani desa bisa menjadi pelaku bisnis yang andal dan akhirnya bisa menjadi pusat bisnis masyarakat pedesaan yang menyejahterakan. Pembangunannya harus dari hilir, yaitu pasar yang melalui komponen tengah ialah agroindustri, baru hulunya *on farm business*.³

Sustainable development mensyaratkan adanya pengelolaan sumberdaya

ekologi secara bijaksana oleh warga masyarakat lokal. Dalam hal ini mekanisme ekologi mencakup aspek lingkungan sekitar yang sangat luas bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya bagaimana masyarakat diberi kesempatan dan didorong untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ekologi-nya secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya fasilitas infrastruktur (saluran irigasi, jembatan, jalan, fasilitas publik lainnya), hutan masyarakat, penggembalaan umum, gunung, sungai dan lain sebagainya.

Beberapa ahli banyak memberikan kritik bahwa selama ini masyarakat cenderung hanya dilibatkan sebagai obyek

3 Sadjad, Sjamsoe'oed, 2000, Memberdayakan Petani Desa, Kompas 22 September 2000.

dalam pengelolaan sumberdaya ekologi, mereka jarang sekali dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan serta pengelolaan sumberdaya ekologi tersebut. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kearifan dan kemampuan dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya ekologi agar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Terkait dengan mekanisme sosial, sebagian besar masyarakat di Indonesia dikenal sebagai salah satu masyarakat di dunia yang mempunyai tradisi komunitarian paling kuat. Tradisi komunitarian tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk *social relationship* yang kuat, masyarakat kita telah banyak berinovasi dalam menciptakan *social relationship* yang memberikan manfaat kepadaarganya. Para ahli telah mangacu *social relationship* sebagai suatu *networking* yang secara spesifik sering disebut dengan terminologi *social capital* (untuk lebih jelas lihat dalam *homepage World Bank*). Saat ini sudah ada kesepahaman bahwa *social capital* memiliki peran penting dan positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Transaksi-transaksi ekonomi akan berjalan dengan lebih efisien jika didukung dengan *social relationship* yang mantap dan kuat.⁴

B. Produk Unggulan

1) Pengertian Produk Unggulan

Produk Unggulan Kawasan Pedesaan atau biasa disebut Prukades merupakan langkah untuk memajukan desa dengan menciptakan produk

unggulan desa. Prukades adalah program pertama dari empat prioritas yang dicanangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) dalam program Dana Desa. Jika sebuah desa telah menemukan produk unggulan untuk dikembangkan maka lebih mudah bagi desa untuk membangun akses pasar dan dapat dikembangkan dalam skala besar sehingga lebih menguntungkan. Penentuan produk unggulan dapat mempertimbangkan beberapa hal anantara lain :

- a. Produk berasal dari potensi sumberdaya lokal, hal ini bertujuan agar sumberdaya yang ada didesa terpakai secara maksimal. Apabila sumberdaya berasal dari luar daerah atau dari luar desa maka disarankan agar melakukan pengolahan kembali atau membuat nilai tambah yang dapat menjadikan pembeda antara produk yang didapatkan dari sumberdaya luar daerah dengan produk unggulan yang akan dipasarkan dari desa tsb.
- b. Memiliki pasar yang besar sehingga produk akan mudah terjual dan menghasilkan keuntungan yang melimpah.
- c. Produk dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa.
- d. Tidak mematikan atau bertolak belakang dengan usaha yang umumnya dijalankan di desa.
- e. Produk unggulan juga dapat mempertimbangkan produk yang sedang tren dipasaran.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas penentuan produk unggulan akan mudah dilakukan dan

⁴ Laporan-laporan hasil studi World Bank tentang *social capital* dapat diakses melalui <http://worldbank.org/poverty/scapital/>

memperkecil kemungkinan kesalahan penentuan produk.

2) **Keuntungan Memiliki Produk Unggulan**

Penentuan produk unggulan kawasan pedesaan akan memberikan banyak keuntungan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Menjadikan Petani Lebih Terampil dan Ahli.

Apabila desa sudah fokus pada satu produk unggulan, maka akan muncul petani-petani yang fokus membudidayakan komoditi tertentu. Ketika mereka fokus dan didukung dengan peningkatan kapasitas, belajar bersama antar petani maka petani akan semakin terampil dan ahli.

b. Mempermudah Akses Modal

Akses modal akan mudah diperoleh apabila suatu desa berfokus pada satu produk unggulan dan melakukan keberlanjutan produksi produk unggulan tersebut. Jika kapasitas produksi produk sudah baik dan berkelanjutan lembaga pembiayaan (Bank, Koperasi dll) akan dapat memberikan akses pembiayaan untuk modal usaha.

c. Menarik Kehadiran Investor

Para investor akan tertarik untuk bekerjasama apabila produk unggulan desa memiliki kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang baik.. Investasi dapat dilakukan pada kerjasama on farm (budidaya), off farm (pengolahan komoditi) dan market (pemasaran). Sehingga pertumbuhan ekonomi desa akan semakin cepat dan merata.

d. Membuka Lapangan Kerja Baru dan Peluang Usaha Baru

Pembuatan Produk Unggulan Desa akan berdampak pada membuka

lapangan kerja baru dan peluang usaha baru, dengan adanya lapangan kerja dan peluang usaha baru secara otomatis akan meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja dan mengurangi Pengangguran yang ada di Desa.

e. Kesejahteraan Meningkat Dan Menanggulangi Kemiskinan Di Perdesaan

Pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan di perdesaan.

3) **Usulan Produk Unggulan**

Tidak perlu proposal tebal untuk menjalankan Prukades, hanya perlu menentukan produk unggulan dengan melampirkan lokus program dan penerima bantuannya dengan jelas. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo.

Sekarang kita sudah mengetahui bahwa untuk menjalankan Prukades tidak memerlukan syarat yang rumit, bahkan dengan menjalankan prukades akan banyak mendatangkan keuntungan bagi desa. Tunggu apalagi? Ayo tentukan Produk Unggulan Kawasan Desa-mu mulai sekarang.

4) **Produk Unggulan Saat Ini**

Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) sebagai wujud kerja sama antardesa yang bermitra dengan pengusaha, saat ini telah berjumlah 343 Prukades. Ini berjalan pada 148 kabupaten di 29 provinsi di Indonesia. Terdapat 18 komoditas yang diusahakan melalui kemitraan dengan 30 perusahaan.

Investasi potensial yang tercipta mencapai Rp 47 triliun. Luas lahan yang direncanakan diupayakan seluas 3,2 juta hektar. Tenaga kerja yang akan terserap 20 juta jiwa, dengan upah yang akan dibagikan Rp 353 triliun setiap tahun.

Seluruh Prukades telah melalui tahapan ketersediaan swasta, penanggung jawab lapangan, dan MoU tiga pihak antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bupati, dan direktur utama perusahaan. Selanjutnya, selama bulan April sampai Mei 2018 telah diagendakan penyelesaian dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara swasta dan Bumdes Bersama. PKB menjadi indikator utama untuk memastikan Prukades dijalankan di lapangan. Prukades yang telah mencapai tahap produksi berada di Kabupaten Merangin (Jambi), Kendal (Jawa Tengah), Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur).

5) Perjalanan Program Produk Unggulan

Sejak awal menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo langsung mencanangkan Program Produk Unggulan Desa (Prudes) mulai Juni 2016. Di tengah perjalanan ditemui peluang untuk memperbesar manfaat ekonomis bagi warga desa melalui ekonomi klaster. Di dalam UU No 6/2014 tentang Desa, pasal 83, ini dinamakan sebagai pembangunan kawasan perdesaan sebagai wujud kerja sama antardesa.

Sejak Desember 2016 dikembangkan Program Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Prukades menguatkan jaringan kerja sama antardesa melalui penguatan Bumdes Bersama. Modal besar dari Bumdes Bersama

menjadi instrumen untuk menjalankan bisnis berskala ekonomis. Swasta dan perbankan juga tersambung sebagai pemasar, off taker maupun pengelola pengolahan komoditas lokal, agar produk unggulan desa memiliki nilai tambah maksimal. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam memastikan perolehan manfaat sebanyak-banyaknya bagi warga desa. Secara keseluruhan terbangun Tim Prukades pada tingkat pusat dan daerah beserta wirausahawan sosial yang sehari-hari mengelola kawasan produktif ini.

Kumulasi penyertaan modal Rp 100 juta dari desa-desa ke dalam Bumdes Bersama mampu menyediakan dana segar tanpa bunga rata-rata Rp 16 miliar per tahun (rata-rata 160 desa tiap kabupaten/kota). Ini memungkinkan penyelenggaraan bisnis bersama secara leluasa di tingkat kabupaten untuk mengolah seluruh asupan dan usaha ikutan dari bisnis utama.

Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) memiliki potensi untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi di perdesaan. Hal ini selanjutnya berpotensi meningkatkan daya beli dan kesejahteraan warga desa.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pelaksanaan Produk Unggulan

Pelaksanaan Produk Unggulan di Daerah Tertentu mengacu pada Instruksi Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Prioritas Kegiatan Kementerian yang diterbitkan pada bulan Mei 2017. Namun, dalam prosesnya dengan pertimbangan tertentu sebagai hasil koordinasi di tingkat Kementerian Desa mengalami perubahan lokasinya.

Tabel 3: Lokasi Produk Unggulan di Daerah Tertentu

No	Provinsi	No	Kabupaten	Potensi	Keterangan
1	Nusa Tenggara Barat	1	Lombok Tengah	Wisata Malam	
		2	Lombok Timur	Sapi	Profile dalam Proses Penyusunan
		3	Sumbawa	Sapi, Lobster	
		4	Lombok Barat	Durian, Wisata	
		5	Dompu	Jagung, Padi	
2	Nusa Tenggara Timur	6	Ende	Wisata Malam	
		7	Ngada	Kopi Arabika	
		8	Timor Tengah Selatan		
		9	Manggarai Barat	Wisata, Jagung	
		10	Kupang	Padi	
		11	Rote Ndao	Wisata Pantai	Profile dalam Proses Penyusunan
		12	Alor	Jagung	Profile dalam Proses Penyusunan
3	Maluku	13	Kepulauan Aru	Ikan	
		14	Seram Bagian Timur	Kelapa	
		15	Maluku Tengah	Padi	
		16	Maluku Tenggara Barat	Perikanan Tangkap, Pertanian	Profile dalam Proses Penyusunan
4	Maluku Utara	17	Pulau Morotai	Kelapan	Profile dalam Proses Penyusunan
		18	Halmahera Barat	Jagung	
		19	Halmahera Selatan	Ikan	
		20	Halmahera Timur	Kelapa	

Sumber: Sesditjen Daerah Tertentu, Kemendesa Tahun 2018

B. Tim Pelaksana

Sebagai upaya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program Produk Unggulan di Daerah Tertentu, maka ditetapkan Tim Pelaksana Prukades di Direktorat Jenderal PDTu dengan Nomor

0153/DPDTT/DPDTu/SK/03/2018.

Diharapkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini semua pihak di Unit Kerja Eselon II bertanggungjawab terhadap keberhasilan program Produk Unggulan di wilayahnya masing-masing.

Tabel 4. Tim Pelaksana Produk Unggulan di Daerah Tertentu

No	Kabupaten	Mitra Usaha Prukades	Komoditi	TIM
1	Parigi Moutong	Pt Hq Corpora Putra	Kelapa Palm, Jagung	PDRP
	Parigi Moutong	Pt Aruna Jaya Nuswantara	Udang	
2	Soppeng	Forum Komunikasi Petani Dan Pengepul Jagung Nusantara (Fkppjn)	Jagung, Kakao	PDRP
	Soppeng	Pt Mega Inovasi Organik (Mio)	Kakao	
	Soppeng	Pt Majestic Buana	Pengolahan Sampah	
3	Konawe	Forum Komunikasi Petani Dan Pengepul Jagung Nusantara (Fkppjn)	Lada	PDRP
	Konawe	Pt Mega Inovasi Organik (Mio)	Lada	
4	Maluku Tengah	Pt. Aruna Jaya Nuswantara	Perikanan	PDRB
	Maluku Tengah	Pt. Hq Corpora Putra	Kelapa	
	Maluku Tengah	Pt Nusantara Coffee	Kopi	
	Maluku Tengah	Pt Estika Tata Tiara	Sapi	
	Maluku Tengah	Yayasan Artha Graha Peduli	Hortikultura	
5	Maluku Tenggara Barat	Pt Pesona Lautan Nusantara	Perikanan	PDRB
	Maluku Tenggara Barat	Pt Hq Corpora Putra	Kelapa, Sapi	
	Maluku Tenggara Barat	Yayasan Artha Graha Peduli	Hortikultura	
6	Kepulauan Aru	Pt Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Peternakan Sapi	PDRB
7	Gorontalo	Pt Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Kelapa & Peternakan	PDPK
	Gorontalo	Yayasan Artha Graha Peduli	Pembinaan Petani	
8	Boalemo	Yayasan Artha Graha Peduli	Jagung	PDPK

No	Kabupaten	Mitra Usaha Prukades	Komoditi	TIM
9	Bone Bolango	Pt Nusantara Coffee	Kopi Robusta	PDPK
	Bone Bolango	Pt Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Padi Organik	
	Bone Bolango	Pt Hq Corpora Putra	Penggemukan Sapi	
10	Bolaang Mongondow Timur	Pt Hq Corpora Putra	Argowisata	PDP
11	Luwu Utara	Pt Aruna Jaya Nuswantara	Ikan	PDP
	Luwu Utara	Pt Rikolto	Kakao	
	Luwu Utara	Pt Mega Inovasi Organik (Mio)	Kakao	
	Luwu Utara	Pt Nusantara Coffee	Kopi	
12	Maluku Tenggara	Yayasan Artha Graha Peduli	Hortikultura	PDP
	Maluku Tenggara	Pt Hq Corpora Putra	Pembinaan Nelayan	
	Maluku Tenggara	Pt Persona Lautan Nusantara	Perikanan	
13	Buru	Yayasan Artha Graha Peduli	Pembinaan Petani	PDPKT
14	Seram Bagian Barat	Yayasan Artha Graha Peduli	Hortikultura	PDPKT
15	Ambon	Yayasan Artha Graha Peduli	Pembinaan Petani	PDPKT
	Ambon	Pt Aruna Jaya Nuswantara	Perikanan	
	Ambon	Pt Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Sapi	
16	Minahasa	Yayasan Artha Graha Peduli	Pembinaan Petani	KABAG REN
	Minahasa	Yayasan Artha Graha Peduli	Pembinaan Petani	
17	Minahasa Utara	Yayasan Artha Graha Peduli	Pembinaan Petani	KABAG REN
18	Manggarai	Pt. Kopi Nusantara	Kopi	KABAG REN
	Manggarai	Pt. Berdikari	Peternakan	
	Manggarai	-	Pariwisata	

Sumber: Seditjen Daerah Tertentu, Kemendesa Tahun 2018

C. Analisa SWOT

Dalam implementasinya, program Produk Unggulan di Daerah Tertentu belum banyak memberikan hasil yang nyata apalagi terkait dampak program Produk Unggulan. Hal ini dikarena beberapa banyak faktor internal, eksternal yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan program Produk Unggulan di Daerah Tertentu.

Oleh karena itu, untuk melihat kondisi implementasi program Produk Unggulan di Daerah Tertentu ini dengan menggunakan Analisa SWOT sebagai berikut.

1) Kelebihan dan Kekurangan

Adapun kelebihan (*strength*) implementasi program Produk Unggulan di Daerah Tertentu antara lain:

- a. Adanya Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan sehingga sudah ada pijakan yang kuat untuk implementasi program Produk Unggulan di Daerah Tertentu.
- b. Adanya Keputusan Dirjen PDTu Nomor 0153/DPDTT/DPDTu/SK/03/2018 tentang Penetapan Tim Pelaksana Program ;
- c. Adanya penunjukan personel yang bertanggungjawab terhadap masing-masing lokasi Produk Unggulan;
- d. Sudah dilaksanakannya rapat koordinasi (internal Ditjen, internal Kementerian Desa), dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta;

Adapun kelemahan (*weakness*) implementasi program Produk Unggulan di Daerah Tertentu yaitu:

- a. Penetapan program Produk Unggulan yang menjadi tanggungjawab di daerah

tertentu tidak sesuai dengan bantuan yang diberikan di daerah tersebut. Misalnya, ikan di Kep Aru dan Kelapan di Pulau Morotai, padahal bantuan PDTu berupa rumput laut di Kep Aru dan Pulau Morotai;

- b. Belum adanya alokasi anggaran yang khusus mengawal keberhasilan implementasi program Produk Unggulan di Daerah Tertentu karena program bukan menjadi core bisnisnya. Coba bandingkan dengan program unit kerja lainnya;
- c. Penanggungjawab implementasi program Produk Unggulan di Daerah Tertentu tidak mempunyai alokasi anggaran yang khusus untuk melakukan monitoring langsung ke kabupaten karena dalam tahun anggaran berjalan, kabupaten tersebut tidak menerima bantuan pemerintah. Seperti di kabupaten Suppeng;
- d. Pelaksanaan koordinasi program Produk Unggulan di Daerah Tertentu dengan pihak pemerintah daerah dan pihak swasta yang akan menjadi investor sangat bergantung pada unit kerja eselon 1 yang lainnya terutama sehingga kondisi ini mempersulita keberhasilan program Produk Unggulan di Daerah Tertentu;
- e. Belum semua kabupaten yang menjadi lokasi program Produk Unggulan di Daerah Tertentu memiliki Dokumen Rencana Induk/Strategis Pengembangan Prukades sehingga kondisi akan menyulitkan bagi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah daerah sendiri;
- f. Daerah Tertentu belum memiliki Petunjuk Teknis tersendiri terkait implementasi Program Produk Unggulan agar memudahkan pelaku

Pemda, Swasta termasuk penanggungjawab dalam implementasinya.

- g. Penanggungjawab program Produk Unggulan di Daerah Tertentu masing-masing kabupaten belum optimal menjalankan dikarenakan harus melaksanakan kegiatan menjadi tugas dan fungsinya yang sudah tercantum dalam RKAKL.

2) Peluang dan Tantangan

Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu yang merupakan pelaksana kebijakan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, mendapatkan pengaruh juga dari luar daerah tertentu karena pengaruh kondisi perekonomian (pusat dan daerah) memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi implementasi program Produk Unggulan dan pengembangan kinerja program kedepannya. Hal ini dapat menjadi peluang tapi dapat juga menjadi tantangan.

Adapun peluang (*opportunity*) tersebut antara lain:

- a. Produk unggulan yang telah ditetapkan masih memungkinkan untuk dilakukan penambahan di kabupaten yang telah ditetapkan sehingga masih membuka untuk pengembangannya;
- b. Beberapa Pemda dari awal antusias untuk pengembangan Produk Unggulan di daerahnya dengan menghadap langsung ke Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi maupun kepada Dirjen. Namun Pemda ini bukan menjadi lokasi Banpem pada tahun berjalan;

- c. Program Produk Unggulan bukan merupakan program baru bagi daerah tertentu (catatan: pada saat masih menjadi bagian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), sudah ada program unggulan Kabupaten dan Program Bedah Desa. Kedua program ini hampir sama dengan program Produk Unggulan saat ini sehingga perlu sinkronisasi saja dari perencanaan sampai pemasarannya.

Adapun tantangan (*treath*) nya, yaitu:

- a. Adanya kemungkinan bergantinya prioritas program Produk Unggulan dengan program yang lainnya pasca adanya pergantian kepemimpinan tahun 2019 sehingga mempengaruhi implementasi Produk Unggulan kedepannya;
- b. Sebagai Kementerian memiliki sejarah yang rentan terhadap perubahan kepemimpinan maka adanya kekuatiran terjadi perubahan kembali Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ini pasca pemiihan presiden tahun 2019;

3) Strategi

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), *treath* (tantangan) maka alternatif strategi sebagai rekomendasi untuk keberhasilan implementasi dan pengembangan program Produk Unggulan di Daerah Tertentu kedepannya agar memiliki dampak yang cukup signifikan ke depannya sebgaimana table berikut ini.

**Tabel 5. Matrik Analisis SWOT
Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu**

Eksternal	Peluang (O)	Tantangan (T)
Internal		
Kekuatan (S)	Strategi SO:	Strategi ST:
	Mengoptimalkan Tim Pelaksana Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu	Mengembangkan penetapan produk unggulan dan lokasi daerahnya.
	Melakukan pelaksanaan koordinasi sendiri untuk program Produk Unggulan di Daerah Tertentu agar tidak tergantung pada unit kerja lainnya.	Memperkuat koordinasi dengan Pemda dan Pihak Swasta yang telah ditetapkan Produk Unggulan nya.
		Melanjutkan Forum Investasi Bisnis yang selama ini sudah dilakukan.
Kelemahan (W)	Strategi WO:	Strategi WT:
	Membuat Juknis Produk Unggulan di Daerah Tertentu tersendiri sebagai penjelasan teknis dari Permendesa terkait Program Pengembangan Kawasan Perdesaan.	Memberikan masukan kebijakan kepada pemimpin Kementerian agar tetap menjadikan program Produk Unggulan sebagai program prioritas. Siapapun pemimpinnya pasca Pilpres 2019
	Mengalokasikan anggaran dan memberikan bantuan pemerintah terhadap kabupaten yang menjadi lokasi program Produk Unggulan di Daerah Tertentu.	
Melakukan peningkatan kapasitas terhadap SDM Produk Unggulan di Daerah Tertentu secara khusus agar betul-betul optimal didalam membangun program produk unggulan.		

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Evaluasi Implementasi Produk Unggulan di Daerah Tertentu ini, dengan menggunakan metode analisis SWOT ini didapatkan sebagai berikut ini

1. Pelaksanaan Produk Unggulan di Daerah Tertentu belum ada yang berjalan secara optimal,
2. Capaian pelaksanaan Produk Unggulan di Daerah Tertentu baru pada tahap akhir koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta,
3. Pelaksanaan Produk Unggulan di Daerah Tertentu belum memberikan dampak sama sekali dikarenakan program Produk Unggulan belum dilaksanakan 100%,
4. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Program Produk Unggulan di Daerah Tertentu lebih banyak karena faktor internal dibandingkan faktor eksternal.

B. Saran

Metode penelitian dengan menggunakan analisis SWOT ini ada sisi kelemahannya, utamanya terkait strategi dan rekomendasi yang dihasilkan apalagi apabila analisis ini dilakukan secara subyektif sehingga boleh jadi hasil analisis penulis akan berbeda dengan orang lain pada saat yang sama.

Oleh karena itu, dalam melakukan analisis SWOT ini perlu diperhatikan oleh pembuat analisis, hal-hal berikut ini:

1. Menjabarkan kekuatan dan kelemahan internal secara realistis. Kelemahan yang disembunyikan atau kekuatan yang tidak terjabarkan akan membuat rekomendasi strategi menjadi tidak tepat;
2. Analisa harus didasarkan atas kondisi yang sedang terjadi dan bukan situasi yang seharusnya terjadi;
3. Menghindari *grey areas* agar mudah membedakan antara kekuatan dan kelemahan, selalu hubungkan situasi yang dihadapi dengan persaingan yang sedang berjalan; dan
4. Menghindari kerumitan yang tidak perlu dan analisa yang berlebihan. Analisa SWOT dibuat sesingkat dan sesederhana mungkin.

DAFTAR PUSTAKA :

Buku dan Hasil Penelitian:

Muhammad, Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Penerbit Rajawali Prrss, Jakarta: 2008.

Nasution, Mustofa Edwin dan Usman, Hardius, Proses Penelitian Kuantitatif, Penerbit FE UI, Cetakan Kedua, Jakarta: Mei 2007

Rais, Sasli dan Flassy, Dance Yulian, 2011, Penguatan Daya Saing Daerah untuk Industri Kluster “Kawasan”, Jurnal Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta, Volume Nomor XI. 17, April 2011, ISSN-1412-7628.

Rais, Sasli dan Flassy, Dance Yulian, 2010, Membangun Daya Saing Daerah: Kajian Perspektif Resource Based, Jurnal Pengembangan Bisnis dan Manajemen, Jakarta; Volume X, Nomor 16, April 2010. ISSN-1412-7628. Pages 55-82.

Rais, Sasli dan Supriyadi, Rohmd, Perspektif Otonomi ‘Mandiri’ Masyarakat Desa, <http://p2dtk.bappenas.go.id>, Desember 2008.

Sekretariat Asisten Deputi Urusan Perdesaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Kawasan: Perspektif Program P2DTK II, Jakarta: Desember 2013

Satria, Arif, Rustiadi, Erman dan Purnomo, Agustina M, 2011, Menuju Desa 2030, Cetakan Pertama, CRESCENT PRESS, Bogor.

Paper :

Franciscus, Welirang, 2002, Pola-Pola Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Besar. Makalah dalam Lokakarya Nasional “Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan” Bappenas 4 Nopember 2002.

Jafar, Marwan, 2014, Arah Dan Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung Transmigrasi, Jakarta: 11 November 2014.

Jafar, Marwan, 2014, Arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: “Nawakerja Prioritas Kementerian”, Disampaikan dalam Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta: 14 November 2014.

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas, RPJMN 2015-2019, RPJMN 2015-2019 Bidang Pengembangan Wilayah, Disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Ruang Rapat Lantai 1,

Gedung Transmigrasi, Jakarta: 11 November 2014.

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Road Map Persiapan Implementasi Undang-Undang Desa Tahun 2014-2019, Disampaikan dalam Rapat Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri di Ruang Rapat Lantai 1, Kemenkokesra, Jakarta: 27 Juni 2014.

....., Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Ditjen PDTu, Jakarta: 2016.

....., Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Ditjen PDTu Tahun 2015-2018.

....., Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2018.

Lain-Lain:

Analisa SWOT, http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT, didownload pada 22 April 2009

Analisa SWOT, Visi dan Misi, <http://www.geocities.com/bukukmhdi/bpo21.html>, didownload pada 22 April 2009.

Hasanuddin, SWOT Analysis, <http://hasanuddin.torajanet.com/?p=39>, 10 September 2008.

http://www.geocities.com/bela_jar/swot.html, didownload pada 22 April 2009.

<http://meidii.multiply.com/journal/item/7>, didownload pada 23 April 2009.